



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 23 Mei 2025

Halaman: 2

DITUANGKAN DALAM PERWAL YOGYAKARTA

Moratorium Hotel Sasar Zona Inti Sumbu Filosofi

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menyatakan akan memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pemberian izin pembangunan hotel baru di kawasan inti (core zone) Sumbu Filosofi.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengutarakan, kebijakan moratorium tersebut telah dituangkan dalam rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang telah diselaraskan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

"Kalimatnya moratorium, bukan pelarangan, ya. Kalau untuk pelarangan

menunggu kajian," ujar Hasto dikutip dari *Antara* di Yogyakarta, Rabu (21/5).

Ia mengungkapkan bahwa kebijakan baru itu telah disampaikan kepada perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY.

Hasto mengimbau para pengelola hotel untuk tidak lagi merencanakan pembangunan di kawasan zona in-

ti Sumbu Filosofi yang mencakup area kanan dan kiri jalur yang membentang lurus mulai dari Tugu Pal Putih, Malioboro, Keraton Yogyakarta, hingga Panggung Krappyak. "Saya sampaikan ke teman-teman di manajemen, manajer-manajer hotel supaya mereka jangan punya keinginan mulai sekarang ini untuk membangun di 'core zone' ini," ucapnya.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah hotel di kawasan inti warisan dunia tersebut saat ini telah mencukupi sehing-

ga diperlukan moratorium. "Mau tidak mau memang itu sudah menjadi mandatori yang harus kami laksanakan. Kajian sementara menunjukkan jumlah hotel sudah cukup," terangnya.

Hasto menegaskan bahwa moratorium tersebut berlaku untuk seluruh klasifikasi hotel, termasuk hotel berbintang empat dan lima. Kebijakan itu berbeda dari moratorium sebelumnya yang diberlakukan pada tahun 2020, yang masih memberikan kelonggaran bagi pembangunan hotel kelas atas.

"Kalau di 'core zone' Sum-

bu Filosofi, semua (klasifikasi) hotel kami moratorium," tegasnya.

Ia juga memastikan bahwa seluruh prosedur administratif terkait moratorium itu telah diselesaikan, ter-

masuk sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi DIY. "Kemarin kita rapat menyatukan ide dengan provinsi dan sudah sinkron. Prosedur resminya sudah selesai," kata Hasto. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005